

BAB III

PENYAJIAN DATA

Pembahasan pada bab ini adalah mengenai penyajian data yang diperoleh penulis dari tempat lokasi penelitian, khususnya pada Strategi PNPM Mandiri dalam Memberdayakan Masyarakat di Kelurahan Rintis Kecamatan Limapuluh Kota Pekanbaru.

Untuk mendapat data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka penulis menggunakan teknik analisa data deskriptif kualitatif dengan cara observasi, dokumentasi dan wawancara. Observasi dalam penelitian ini berisikan melihat secara langsung dari kegiatan PNPM Mandiri dalam menjalankan program yang di rencanakan, Kemudian dokumentasi dalam penelitian ini ialah mengambil data-data yang berkaitan dengan penelitian penulis baik pada arsip PNPM Mandiri maupun arsip pada lokasi penelitian, dan wawancara dalam penelitian ini diperuntukkan kepada orang-orang yang terlibat dalam pelaksanaan strategi PNPM Mandiri dalam pemberdayaan di Kelurahan Rintis Kecamatan Limapuluh Kota Pekanbaru dengan teknik sampel *Total Sampling* yaitu dengan mengambil keseluruhan populasi untuk di jadikan sampel penelitian.

A. Strategi PNPM Mandiri dalam Memberdayakan Masyarakat

Strategi dalam pemberdayaan merupakan salah satu cara untuk mengembangkan kemandirian masyarakat yang berkelanjutan dalam upaya mengurangi tingkat kemiskinan/pengangguran yang ada di setiap wilayah. Hasil dari kegiatan ini mencakup tiga hal yaitu perbaikan lingkungan, sosial dan ekonomi. Strategi PNPM Mandiri dalam memberdayakan masyarakat di

Kelurahan Rintis Kecamatan Limapuluh Pekanbaru dalam penelitian ini dapat diukur dengan konsep operasional yang sudah ditetapkan sebelumnya dan pengambilan data tersebut melalui wawancara kepada responden. Adapun hasil wawancara yang diperoleh dalam penelitian ini ialah:

a. Pemberdayaan Bidang Lingkungan

Penyediaan sarana dan prasarana merupakan kegiatan yang menyangkut kepentingan masyarakat banyak dalam upaya perlindungan/pemeliharaan lingkungan baik lingkungan alami maupun buatan termasuk perumahan dan permukiman yang harus layak, terjangkau, sehat, aman, teratur dan serasi.

Indikator kinerja pada sarana lingkungan minimal 70% dari prasarana yang dibangun, prasarana lebih murah 20% dibandingkan dengan yang dibangun dengan pola tidak bertumpu pada masyarakat, kemudian di 80% kelurahan sasaran. Berikut hasil dari wawancara yang diperoleh:

“PNPM Mandiri cukup membantu dalam membangun dan memberdayakan masyarakat di kelurahan kami, sarana dan prasarana yang sudah dibantu seperti pembangunan jalan beton, sumur bor, dan tempat sampah, sarana ini diperoleh dari APBD maupun dari PNPM Mandiri itu sendiri (Wawancara, Junaidi).

Kepala Lurah Rintis mengatakan bahwa PNPM Mandiri selama ini cukup membantu dalam memfasilitasi masalah pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang ada di kelurahan rintis. Sarana dan prasarana yang dibantu oleh PNPM Mandiri di Kelurahan Rintis ini cukup memadai seperti pembangunan jalan beton, pembangunan sumur bor dan Penyediaan Tempat Sampah (TPS). Kemudian Sarana dan prasarana

tersebut diperoleh dari Anggaran yang telah ditetapkan oleh APBD maupun dari PNPM itu sendiri (Junaidi, Wawancara, 07 Februari 2014).

“Kami menyediakan sarana dan prasarana seadanya saja seperti pembuatan jalan beton. Bantuan ini diperoleh dari APBD/APBN kemudian dibagikan kepada wilayah yang pantas mendapatkannya dengan membuat proposal (Wawancara, Hariadi). Sarana dan prasarana yang dibantu oleh PNPM Mandiri seperti semenisasi, sumur bor, rumah layak huni yang diperoleh dari APBD/APBN (Wawancara, Malik)”.

PNPM Mandiri menyediakan sarana dan prasarana seadanya saja seperti pembuatan jalan beton. Sarana dan prasarana ini dari anggaran APBN/APBD kemudian dialokasikan kepada wilayah yang berhak mendapatkannya dengan cara membuat proposal selain itu juga diperoleh dari anggaran atau uang kas yang ada di setiap Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM) untuk dipergunakan sesuai dengan apa yang dibutuhkan (Hariadi, Wawancara, 07 Februari 2014).

Dengan hal yang sama juga dikatakan oleh ketua Lembaga Keswadayaan Masyarakat Kelurahan Rintis bahwa sarana dan prasarana yang sudah dibantu oleh PNPM Mandiri dalam hal infrastruktur seperti semenisasi, Sumur Bor, rumah layak huni. Sarana dan prasarana ini diperoleh dari Anggaran Pemerintah (APBD/APBN) yang sudah disediakan (Malik, Wawancara, 16 Februari 2014).

Strategi pemberdayaan dalam bidang lingkungan melalui beberapa tahap berikut ini:

1. Strategi perencanaan

Merencanakan kegiatan merupakan tahap persiapan dan sosialisasi awal serta perencanaan di desa/kelurahan, kecamatan, dan kabupaten. Perencanaan harus dapat dimanfaatkan oleh seluruh pelaku PNPM Mandiri disemua tingkatan sebagai upaya untuk mendorong partisipasi dan pengawasan dari semua pihak, sehingga semua pelaku PNPM Mandiri memiliki pemahaman yang sama terhadap program (Dokumen PNPM, 2008: 17).

Perencanaan yang kami lakukan selaku fasilitator sudah cukup efektif dan berjalan sesuai dengan perencanaan awal (Hariadi, Wawancara, 07 Februari 2014). Hal yang sama juga dikatakan ketua lembaga keswadayaan masyarakat bahwa perencanaan sudah cukup efektif dan berjalan dengan lancar (Malik, Wawancara, 16 Februari 2014).Selaku Fasilitator Sosial mengatakan bahwa perencanaan yang dilakukan masih belum sempurna atau tidak begitu sesuai dengan harapan kami (Ani, Wawancara, 12 Februari 2014).

2. Strategi pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan adalah tahap pelaksanaan seluruh rencana yang telah disepakati dalam pertemuan Musyawarah Antar Desa/Kelurahan (sosialisasi), penetapan usulan, serta rapat-rapat persiapan pelaksanaan.

Pelaksanaan sejauh ini kurang efektif karena terkadang yang kami rencanakan di awal terhambat karena faktor-faktor tertentu misalnya dana/anggaran yang kurang memadai (Hariadi, Wawancara, 07 Februari 2014).

Pelaksanaan Program yang dilakukan baik dari masyarakat maupun dari tim fasilitator bisa dikatakan sudah cukup baik dan efektif karena mereka sudah mau menjalankan program yang sudah direncanakan walaupun terkadang ada faktor penghambat (Malik, Wawancara, 16 Februari 2014).

Kemudian selaku Fasilitator Sosial mengatakan bahwa pelaksanaan yang dilakukan masih belum sempurna atau tidak begitu sesuai dengan harapan kami (Ani, Wawancara, 12 Februari 2014).

3. Strategi pelestarian

Strategi pemeliharaan/pelestarian PNPM Mandiri diarahkan kepada adanya perawatan dan pengembangan berbagai sarana dan prasarana yang ada, sehingga dapat secara terus-menerus dimanfaatkan oleh masyarakat secara efektif dan efisien.

Untuk menjamin terjadinya pemeliharaan, kegiatan yang harus dilakukan adalah:

- a. Rencana pemeliharaan sudah dimasukkan dalam usulan kegiatan. Tim pemeliharaan segera dibentuk dan dilatih paling lambat setelah penetapan usulan.
- b. Untuk setiap jenis prasarana tertentu, telah dibuat daftar penanggung jawab dan penetapan iuran.
- c. Untuk jenis kegiatan lain, ditetapkan kelompok pengelola dan pemeliharaan (Dokumentasi, 2008: 39).

Pelestarian sejauh ini dilakukan PNPM Mandiri kurang efektif dan tidak berjalan dengan baik (Hariadi, Wawancara, 07 Februari 2014). Begitu juga dikatakan ketua Lembaga Keswadayaan Masyarakat bahwa pelestarian masih kurang efektif dan tidak berjalan dengan baik (Malik, Wawancara, 16 Februari 2014).

Fasilitator Sosial mengatakan bahwa pelestarian yang dilakukan masih belum sempurna atau tidak begitu sesuai dengan harapan kami (Ani, Wawancara, 12 Februari 2014).

4. Strategi pengawasan

PNPM Mandiri melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan program kerja harus mengetahui gerak-gerik yang akan dilakukan oleh masyarakat itu dalam menjalankan program kegiatan sehingga tidak ada simpang siur yang melanggar dari aturan yang sudah ada. Pengawasan yang dimaksud seperti melaporkan tentang kegiatan-kegiatan yang berkembang dalam masyarakat tentang masalah atau kendala-kendala yang mereka hadapi. Adapun pengawasan yang lakukan selama ini tidak berjalan sebagaimana mestinya seperti berikut ini:

Untuk pengawasan bisa dikatakan kurang efektif karena sejauh ini masyarakat yang melaksanakan program mereka mengawasi diri mereka sendiri dengan tidak melakukan kecurangan misalnya terlambat dalam pembayaran hasil pinjaman yang melebihi tanggal/waktu yang telah ditetapkan setiap bulannya (Hariadi, Wawancara, 07 Februari 2014).

Hal yang sama juga dikatakan ketua lembaga keswadayaan masyarakat (LKM) bahwa Pengawasan dalam hal ini biasanya masyarakat hanya mengawasi diri mereka sendiri namun mereka selalu memberikan laporan dari hasil program yang mereka jalankan (Malik, Wawancara, 16 Februari 2014). Kemudian Fasilitator Sosial mengatakan bahwa pengawasan yang dilakukan masih belum sempurna atau tidak begitu sesuai dengan yang diharapkan (Ani, Wawancara, 12 Februari 2014).

5. Strategi evaluasi

Dalam mengembangkan langkah-langkah strategi PNPM Mandiri yaitu mengevaluasi atas hal-hal yang telah dicapai dalam setiap periode jangka pendek sebagai suatu proses untuk melakukan kontrol dan sebagai input untuk pengambilan keputusan dimasa depan.

Pada tahap evaluasi juga masih kurang efektif dan tidak berjalan dengan baik dan lancar (Hariadi, Wawancara, 07 Februari 2014). Begitu juga dikatakan ketua Lembaga Keswadayaan Masyarakat bahwa untuk tahap evaluasi masih kurang efektif (Malik, Wawancara, 16 Februari 2014).

Hal yang sama juga dikatakan Tim Fasilitator Sosial bahwa evaluasi yang dilakukan masih belum sempurna atau tidak begitu sesuai dengan yang diharapkan (Ani, Wawancara, 12 Februari 2014).

b. Pemberdayaan Bidang Sosial

Untuk mewujudkan program bidang sosial sehingga dapat telaksana tepat pada sasaran secara langsung dapat memberikan layanan sosial yang semakin berkualitas bagi masyarakat dengan melakukan kegiatan sosialisasi awal dan pelatihan masyarakat hingga pada tingkat fasilitator.

Kegiatan sosialisasi merupakan kegiatan pertemuan antara seluruh tim fasilitator maupun pihak-pihak yang bekerjasama di kelurahan dengan masyarakat dengan tujuan menentukan perencanaan dalam melaksanakan program PNPM Mandiri di suatu wilayah.

“Sosialisasi dilakukan dengan cara rembuk warga dengan tujuan untuk mengetahui karakter warga di daerah itu dan memberikan informasi rencana kegiatan serta menyepakati aturan dan sanksi yang akan di tetapkan bagi yang melanggar aturan (Wawancara, Hariadi). Sosialisasi dilakukan dengan mengajak pertemuan antara masyarakat dengan fasilitator dengan tujuan untuk membicarakan program-program PNPM Mandiri (Wawancara, Elvira). Sebelum melaksanakan program terlebih dahulu diadakan sosialisai dengan tujuan masyarakat tahu tentang PNPM itu dan masyarakat menerima pa tidak dengan program PNPM (Wawancara, Ani)”.

Sebelum melaksanakan kegiatan PNPM Mandiri, terlebih dahulu diadakan sosialisasi dengan cara rembuk warga atau pertemuan dengan masyarakat. Tujuan dalam sosialisasi ini ialah untuk mengetahui karakter warga yang ada di daerah tersebut kemudian memberikan informasi tentang rencana-rencana kegiatan serta menyepakati dan menetapkan aturan dan sanksi-sanki yang akan di terapkan selama pelaksanaan kegiatan (Hariadi, Wawancara, 07 februari 2014).

Pelaksanaan kegiatan PNPM Mandiri melakukan sosialisasi awal dengan cara mengadakan pertemuan antara masyarakat dengan pihak fasilitator. Sosialisai ini bertujuan untuk membicarakan hal-hal yang akan di laksanakan dalam program PNPM Mandiri (Elvira, Wawancara, 07 februari 2014).

Untuk menjalankan program PNPM Mandiri, sosialisasi merupakan langkah awal dilakukan dalam pelaksanaan program yang akan direncanakan dengan tujuan agar masyarakat mengetahui apa sebenarnya PNPM Mandiri itu sendiri sehingga masyarakat menerima atau tidaknya dengan adanya program dari PNPM Mandiri ini (Ani, Wawancara, 12 Februari 2014).

Selanjutnya kegiatan pelatihan merupakan kegiatan PNPM Mandiri yang bertujuan agar para pelaku mempunyai pengetahuan yang berhubungan dengan program baik secara konsep maupun teknis, mempunyai sikap yang mendukung tahap program maupun menjalankan pendampingan dalam proses pembelajaran (Observasi, 08 Februari 2014)

“Pelatihan yang diberi semacam materi pengetahuan secara konsep maupun teknis untuk memacu tingkat kemandirian masyarakat dari tidak berdaya, berdaya, kemudian menjadi mandiri. Pelatihan ini rutin dilakukan sesua dengan perencanaan awal, namun dibelakangan ini hanya sebulan atau dua bulan sekali yaitu pelatihan dasar, pelatihan madya dan pelatihan utama yang dilakukan di balai kelurahan, gedung pemerintahan, hotel dan tempat lain yang bisa di sewa. Pelatihan yang dilakukan sebetulnya sangat bermanfaat bagi masyarakat namun mereka tidak mau menerapkan dari apa yang dilatih sehingga sia-sia saja (Wawancara, Hariadi)”.

Pelatihan dengan memandirikan masyarakat yang ada di kelurahan rintis, mereka diberi semacam materi pengetahuan baik secara konsep maupun teknis guna memacu tingkat kemandirian masyarakat dari yang tidak berdaya, berdaya dan menjadi mandiri dengan cara diberikan pinjaman bergulir (Hariadi, Wawancara, 07 Februari 2014).

Pelatihan yang PNPM Mandiri lakukan rutin dilaksanakan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan di awal, namun selama ini pelatihan dilakukan terkadang sebulan sekali dan juga dua bulan sekali yaitu pelatihan dasar dengan cara mengembangkan pola pikir masyarakat dan pemahaman dasar tentang PNPM Mandiri, kemudian pelatihan madya ialah pelatihan lanjutan dalam pemahaman dan kemampuan masyarakat dalam melakukan kemitraan atau usaha, dan selanjutnya pelatihan utama yaitu dengan memberikan materi yang riil seperti pelatihan masak-memasak, menjahit, membuat souvenir, daur ulang sampah dan lain-lain yang dilaksanakan seperti di balai kelurahan, gedung pemerintahan, hotel dan tempat lain yang bisa di sewa. (Hariadi, Wawancara, 07 Februari 2014).

Pelatihan ini sangat bermanfaat bagi masyarakat yang ikut dalam Lembaga Keswadayaan Masyarakat namun masyarakat kurang mau dalam menerapkan atau melaksanakan apa yang telah di ajarkan atau dilatihkan selama pelatihan tersebut, konsekuensinya pelatihan tersebut sia-sia saja. Padahal sebenarnya pelatihan ini sangat bermanfaat bagi mereka dan Narasumber yang diambil dari orang-orang yang berpengalaman seperti dari Fasilitator PNPM Mandiri dan orang luar yang dianggap bisa memberi

materi pelatihan (Hariadi, Wawancara, 07 Februari 2014). Hal yang sama juga dikatakan oleh salah seorang Tim Fasilitator sosial yang mana narasumber dalam pelatihan diambil dari Fasilitator Kelompok maupun dari pihak-pihak luar yang dianggap mampu atau bisa menjadi narasumber pelatihan (Ani, Wawancara, 12 Februari 2014).

“Dalam menjalankan program terlebih dahulu mereka dilatih dalam bermandiri yang dilakukan sebulan sekali seperti daur ulang sampah, souvenir, pelatihan komputer, membatik, menjahit dan lain-lain yang dilaksanakan di balai kelurahan atau menyewa tempat-tempat seperti gedung pemerintahan, hotel. Pelatihan selama ini cukup lancar dan bermanfaat bagi masyarakat yang hadir dengan narasumber dari kami sendiri. “Sejauh ini tingkat kesadaran masyarakat cukup bagus karena setiap ada pelatihan mereka selalu ikut namun ada juga sebagian yang tidak ikut mungkin karena ada kesibukan diluar (Wawancara, Elvira). Masyarakat terkadang tidak mau dilatih, karena kata mereka hanya membuang waktu saja” (Wawancara, Dewi)”.

Selanjutnya dikatakan juga oleh Tim Fasilitator Teknik bahwa sebelum masyarakat menjalankan program seperti usaha kecil-kecilan terlebih dahulu mereka dilatih dalam bermandiri yang diadakan satu kali dalam satu bulan selama program tersebut berjalan seperti pelatihan daur ulang sampah, souvenir, pelatihan komputer, batik, menjahit dan lain-lain. pelatihan biasanya diadakan di balai kelurahan atau pun menyewa tempat-tempat lainnya seperti gedung pemerintahan, hotel dan lain sebagainya. Pelatihan yang dilakukan selama ini cukup lancar dan bermanfaat bagi masyarakat yang ikut karena disitu mereka dilatih dalam bermandiri dan juga mendapat ilmu pengetahuan yang lebih untuk dikembangkan dengan narasumber dari PNPM Sendiri (Elvira, Wawancara, 07 Februari 2014).

Tingkat kesadaran masyarakat dalam mengikuti pelatihan yang di adakan oleh PNPM Mandiri cukup bagus dan meningkat karena setiap ada pelatihan mereka selalu ikut. Namun ada juga sebagian yang terkadang tidak ikut dalam pelatihan tersebut karena kurangnya kesadaran atau ada kepentingan lain (Elvira, Wawancara, 07 Februari 2014). Namun berbeda yang dikatakan oleh Fasilitator Ekonomi bahwa biasanya masyarakat kurang disiplin dalam mengikuti pelatihan karena mereka menganggap bahwa dengan mengikuti pelatihan seperti yang di adakan oleh PNPM Mandiri hanya membuang waktu saja (Dewi, Wawancara, 11 Februari 2014).

“Pelatihan bertujuan agar masyarakat tahu tahapan siklus dari siklus satu sampai siklus empat yang diadakan satu kali dengan kategori pelatihan untuk relawan, RT/RW, UP-UP yang bertempat dikelurahan setempat dan 50% sudah bermanfaat dan berjalan dengan lancar dengan narasumber dari faskel dan orang luar yang dianggap mampu (Wawancara, Ani). Masyarakat dilatih seperti pelatihan souvenir, membuat guna untuk meningkatkan keterampilan dalam membantu ekonomi keluarga (Wawancara, Malik)”.

Tidak terlepas juga pendapat dari Tim Fasilitator Sosial bahwa pelatihan-pelatihan tersebut berguna agar masyarakat mengetahui tahapan siklus yang diprogramkan mulai dari siklus satu sampai ke siklus empat. pelatihan ini diperuntukkan kepada relawan, RT/RW,UP-UP maupun kepada Tim Fasilitator yang diadakan dibalai kelurahan dan bisa dikatakan 50% sudah lancar dan bermanfaat bagi masyarakat yang mengikuti pelatihan (Ani, Wawancara, 12 Februari 2014).

Hal yang sama juga dikatakan oleh ketua LKM Kelurahan Rintis, mereka diberi pelatihan seperti souvenir, membuat untuk meningkatkan keterampilan dalam membantu ekonomi keluarga. Pelatihan tersebut diadakan sesuai dana yang ada (Malik, Wawancara, 16 Februari 2014).

Strategi pemberdayaan dalam bidang sosial melalui beberapa tahap berikut ini:

1. Strategi perencanaan

Inti yang ditekankan dalam perencanaan dengan metode ini adalah mengajak masyarakat untuk mengungkapkan sendiri tentang potensi, daya, masalah, kebutuhan dan keinginan yang ingin mereka wujudkan. Dengan demikian perencanaan yang dibuat benar-benar mengakomodasikan problem, kebutuhan, dan cara-cara pemecahan masalah sesuai keinginan masyarakat (Zubaedi, 2013: 216).

Pada tahap perencanaan, kegiatan sosial disosialisasikan kepada masyarakat bukan hanya dalam arti sempit, tapi juga dalam arti luas. Kegiatan sosial dalam arti luas meliputi seluruh proses pemberdayaan dalam kegiatan dalam perencanaan adalah sebagai gerakan sosial.

Sebagaimana yang dikatakan ketua tim fasilitator bahwa perencanaan yang kami lakukan sudah cukup efektif dan berjalan sesuai dengan perencanaan awal (Hariadi, Wawancara, 07 Februari 2014). Hal yang sama juga dikatakan ketua lembaga keswadayaan masyarakat bahwa perencanaan sudah cukup efektif dan berjalan dengan lancar (Malik, Wawancara, 16 Februari 2014).Selaku Fasilitator Sosial

mengatakan bahwa perencanaan yang dilakukan masih belum sempurna atau tidak begitu sesuai dengan harapan kami (Ani, Wawancara, 12 Februari 2014).

2. Strategi pelaksanaan

Tahap pelaksanaan adalah bagian terpenting dalam kegiatan sosial karena mewujudkan rencana kedalam tindakan hingga seberapa jauh tindakan menimbulkan perubahan yang diharapkan dan seberapa besar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Pelaksanaan sejauh ini kurang efektif karena terkadang yang kami rencanakan di awal terhambat karena faktor-faktor tertentu misalnya dana/anggaran yang kurang memadai (Hariadi, Wawancara, 07 Februari 2014).

Pelaksanaan Program yang dilakukan baik dari masyarakat maupun dari tim fasilitator bisa dikatakan sudah cukup baik dan efektif karena mereka sudah mau menjalankan program yang sudah direncanakan walaupun terkadang ada faktor penghambat (Malik, Wawancara, 16 Februari 2014).

Kemudian selaku Fasilitator Sosial mengatakan bahwa pelaksanaan yang dilakukan masih belum sempurna atau tidak begitu sesuai dengan harapan kami (Ani, Wawancara, 12 Februari 2014).

3. Strategi pelestarian

Strategi pemeliharaan/pelestarian PNPM Mandiri diarahkan kepada adanya perawatan dan pengembangan berbagai sarana dan prasarana

yang ada, sehingga dapat secara terus-menerus dimanfaatkan oleh masyarakat secara efektif dan efisien.

Pelestarian sejauh ini dilakukan PNPM Mandiri kurang efektif dan tidak berjalan dengan baik (Hariadi, Wawancara, 07 Februari 2014). Begitu juga dikatakan ketua Lembaga Keswadayaan Masyarakat bahwa pelestarian masih kurang efektif dan tidak berjalan dengan baik (Malik, Wawancara, 16 Februari 2014).

Fasilitator Sosial mengatakan bahwa pelestarian yang dilakukan masih belum sempurna atau tidak begitu sesuai dengan harapan kami (Ani, Wawancara, 12 Februari 2014).

4. Strategi pengawasan

PNPM Mandiri melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan program kerja harus mengetahui gerak-gerik yang akan dilakukan oleh masyarakat itu dalam menjalankan program kegiatan sehingga tidak ada simpang siur yang melanggar dari aturan yang sudah ada. Pengawasan yang dimaksud seperti melaporkan tentang kegiatan-kegiatan yang berkembang dalam masyarakat tentang masalah atau kendala-kendala yang mereka hadapi. Adapun pengawasan yang lakukan selama ini tidak berjalan sebagaimana mestinya seperti berikut ini:

Untuk pengawasan bisa dikatakan kurang efektif karena sejauh ini masyarakat yang melaksanakan program mereka mengawasi diri mereka sendiri dengan tidak melakukan kecurangan misalnya terlambat dalam

pembayaran hasil pinjaman yang melebihi tanggal/waktu yang telah ditetapkan setiap bulannya (Hariadi, Wawancara, 07 Februari 2014).

Hal yang sama juga dikatakan ketua lembaga keswadayaan masyarakat (LKM) bahwa Pengawasan dalam hal ini biasanya masyarakat hanya mengawasi diri mereka sendiri namun mereka selalu memberikan laporan dari hasil program yang mereka jalankan (Malik, Wawancara, 16 Februari 2014). Kemudian Fasilitator Sosial mengatakan bahwa pengawasan yang dilakukan masih belum sempurna atau tidak begitu sesuai dengan yang diharapkan (Ani, Wawancara, 12 Februari 2014).

5. Strategi evaluasi

Dalam mengembangkan langkah-langkah strategi PNPM Mandiri yaitu mengevaluasi atas hal-hal yang telah dicapai dalam setiap periode jangka pendek sebagai suatu proses untuk melakukan kontrol dan sebagai input untuk pengambilan keputusan dimasa depan.

Pada tahap evaluasi juga masih kurang efektif dan tidak berjalan dengan baik dan lancar (Hariadi, Wawancara, 07 Februari 2014). Begitu juga dikatakan ketua Lembaga Keswadayaan Masyarakat bahwa untuk tahap evaluasi masih kurang efektif (Malik, Wawancara, 16 Februari 2014).

Hal yang sama juga dikatakan Tim Fasilitator Sosial bahwa evaluasi yang dilakukan masih belum sempurna atau tidak begitu sesuai dengan yang diharapkan (Ani, Wawancara, 12 Februari 2014).

c. Pemberdayaan Bidang Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah terjadinya penambahan/perubahan pendapatan nasional (produksi nasional/GDP/GNP) dalam satu tahun tertentu, tanpa memperhatikan pertumbuhan penduduk dan aspek lainnya (Mahyudi, 2004: 1).

Pinjaman bergulir yang dimaksud ialah proses pinjaman yang diberikan kepada masyarakat dalam upaya menyasikan kesejahteraan material dengan mengembangkan peluang usaha untuk meningkatkan pendapatan dalam kebutuhan hidup. Bagi Desa/Kelurahan baru, modal BLM untuk kegiatan pinjaman bergulir sebesar 30%. Sebagaimana hasil dari wawancara berikut ini:

“Pinjaman bergulir dikelola dengan baik karena masyarakat membuat UKM untuk membuat proposal kegiatan untuk pencairan dana yang sudah ditetapkan pemerintah dengan jasa 1% hingga 1,5% (Wawancara, Hariadi). Dalam mengelolah dana sejauh ini cukup baik dan masyarakat merasa terbantu, dana ini diperoleh dari anggaran pemerintah dengan dana awal diberikan kepada setiap kelompok Rp. 500.000/orang, apabila pembayaran lancar maka pinjaman berikutnya akan ditingkatkan (Wawancara, Elvira)”.

Dana pinjaman bergulir sudah cukup dikelola dengan baik karena dana tersebut kami kelola dengan cara masyarakat membuat Unit Kelompok Masyarakat (UKM) melalui Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM) yang ada di kelurahan kemudian UKM tersebut membuat proposal kegiatan usaha untuk pencairan dana yang sudah di tetapkan oleh pemerintah maupun pihak PNPM Mandiri dengan jasa pinjaman 1% hingga 1,5% .(Hariadi, Wawancara, 07 Februari 2014).

Sejauh ini pihak PNPM Mandiri dalam mengolah anggaran yang ada cukup baik dan masyarakat merasa terbantu dengan adanya dana pinjaman bergulir, dana tersebut di peroleh dari anggaran pemerintah daerah yang telah disediakan, dana awal di berikan kepada setiap kelompok sebesar Rp.500.000/orang, jika dalam kelompok terdapat 5 orang maka seluruh dana dimiliki oleh setiap kelompok Rp.2.500.000 kemudian apabila pembayaran pinjamannya lancar maka untuk peminjaman berikutnya akan ditingkatkan lagi (Elvira, Wawancara, 07 Februari 2014).

“Dana pinjaman bergulir tentu saja digunakan untuk hal yang berguna karena setiap pinjaman harus membuat proposal kegiatan dengan diperiksa terlebih dahulu oleh tim fasilitator (Wawancara, Roza). Pinjaman bergulir ada yang tepat sasaran dan ada yang tidak tepat sasaran dan alhamdulillah dana tersebut dapat dikelola dengan baik. dana diperoleh dari APBN, ada pentaskin, ada PLBK, ada P4IP. Pinjaman pertama 5.000.000 untuk satu kelompok” (Wawancara, Dewi).

Dana pinjaman bergulir tentu saja digunakan untuk hal-hal yang berguna, karena dana pinjaman bergulir harus menyertakan proposal usaha kelompok. Kemudian proposal tersebut diperiksa oleh Tim Fasilitator yang bertugas di kelurahan tersebut (Roza, Wawancara 07 Februari 2014).

Dengan hal yang tidak jauh berbeda bahwa Pinjaman bergulir yang PNPM Mandiri berikan kepada masyarakat ada yang tepat sasaran dan ada juga yang tidak tepat sasaran. Namun, dana tersebut dapat mereka kelola dengan baik dan dana yang dimiliki oleh PNPM Mandiri tidak dapat di hitung dengan jelas dan pasti tergantung pada proposal yang diajukan. Kemudian dana tersebut diperoleh dari APBD/APBN, Pentaskin, PLBK dan

P4IP. Dana yang diberikan kepada setiap Unit Kelompok Masyarakat sebesar Rp. 5.000.000 kemudian di bagi rata kepada setiap orang (Dewi, Wawancara, 11 Februari 2014).

Dana Pinjaman bergulir yang diberikan kepada masyarakat berkisar Rp.500.000 sampai dengan Rp.2.000.000 setiap Unit Kelompok Masyarakat (Malik, Wawancara, 16 Februari 2014).

Selanjutnya dalam memenuhi Sandang, pangan, dan papan merupakan kebutuhan pokok dalam kehidupan sehari-hari seperti rumah tempat tinggal, pakaian serta makanan yang selalu menjadi pikiran utama dalam memenuhinya guna mensejahterakan keluarga. Dengan demikian berikut hasil dari wawancara penulis:

“Rata-rata masyarakat di kelurahan rintis masih mengontrak rumah namun pada pakaian dan makanan mereka sudah mampu memenuhinya. Karena mereka menggunakan sepeda motor sehingga masyarakat cepat dalam beraktivitas. Usaha-usaha yang mereka lakukan dengan membuka warung kecil-kecilan, galon air, tukang dan jasa jahit (Wawancara, Elvira)”.

Setelah mengikuti program dalam PNPM Mandiri ini, masyarakat di Kelurahan Rintis rata-rata masih masih ngontrak/menyewa rumah namun pada pakaian dan makanan pokok cukup mudah di dapat. Karena, masyarakat tidak lagi berjalan kaki untuk pergi keluar rumah yaitu dengan menggunakan kendaraan sepeda motor sehingga masyarakat lebih cepat dan mudah dalam beraktivitas. Selama ini usaha yang masyarakat lakukan ialah dengan membuka warung-warung kecil, galon air, tukang, jasa menjahit (Elvira, Wawancara, 07 Februari 2014).

“Mereka sudah dapat memenuhi sandang, pangan dan papan dengan cara membuka usaha kecil-kecilan (Wawancara Dewi)”.

Masyarakat sudah dapat memenuhi sandang, pangan dan papan karena setiap dana yang diberikan mereka kelola dengan baik dengan cara membuka usaha kecil-kecilan atau kedai harian (Dewi, Wawancara, 11 Februari 2014).

Pendapatan yang diperoleh oleh masyarakat rata-rata sudah mengalami peningkatan bagi mereka yang sungguh-sungguh dalam berusaha atau mengolah dana pinjaman bergulir ini namun pada penghasilan yang mereka dapati tidak bisa ditetapkan dengan pasti (Elvira, Wawancara, 07 Februari 2014).

Didalam pembangunan jangka panjang, pemerintah telah menyadari pentingnya pentingnya peningkatan tenaga sumber daya manusia. Hal itu tercermin dalam GBHN bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia dapat dilakukan melalui jalan pendidikan, latihan kerja profesional, dan sebagainya. Jika kualitas sumber daya manusia meningkat, otomatis akan meningkatkan tingkat produktivitas secara nasional pula. Dengan meningkatnya kualitas sumber daya manusia, tak lagi dijumpai kesulitan bagi perusahaan maupun lembaga dalam mencari tenaga yang terampil dan profesional yang merangkap kerja (Sudrajat, 2000: 9).

Pendidikan merupakan salah satu cara dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia guna mengembangkan pola pikir dan keterampilan dalam menentukan tujuan yang dicapai. Semakin tinggi pendidikan yang

dimiliki maka semakin luas pulalah pola pikirnya. Masyarakat dikelurahan rintis sudah memiliki pendidikan yang cukup seperti yang dikatakan dari wawancara ini:

“Pendidikan mereka ada yang tamat SD, SMP, SMA, bahkan ada yang S1 (Wawancara, Elvira). Pendidikan mereka banyak yang tamat SD namun tidak ada yang buta huruf. Pendidikan mereka dapat mendorong kemandirian” (Wawancara, Dewi)”.

Pendidikan yang dimiliki oleh masyarakat yang ada di dalam Unit Kelompok Masyarakat ini sudah cukup standar yaitu ada yang tamat SD,SLTP,SLTA bahkan ada yang sudah sarjana (S1) (Elvira, Wawancara, 07 Februari 2014). Hal yang sama juga dikatakan oleh ketua LKM Kelurahan Rintis bahwa pendidikan mereka ada yang tamat SD, SLTP. SLTA (Malik, Wawancara, 16 Februari 2014).

Kemudian dikatakan tim fasilitator ekonomi bahwa Rata-rata pendidikan yang mereka miliki adalah hanya tamat Sekolah Dasar namun begitu tidak ada yang buta huruf, dengan begitu pendidikan yang mereka miliki juga dapat mendorong kemandirian dalam berusaha. (Dewi, Wawancara, 11 Februari 2014).

Strategi pemberdayaan dalam bidang ekonomi melalui beberapa tahap berikut ini:

1. Strategi perencanaan

Perencanaan adalah proses dasar yang digunakan untuk memilih tujuan dan menentukan cakupan pencapaiannya. Merencanakan berarti mengupayakan penggunaan sumber daya manusia (*human resources*),

sumber daya alam (*natural resource*), dan sumber daya lainnya (*other resource*) untuk mencapai tujuan (Siswanto, 2009: 42).

Namun, perencanaan yang kami lakukan selaku fasilitator sudah cukup efektif dan berjalan sesuai dengan perencanaan awal (Hariadi, Wawancara, 07 Februari 2014). Hal yang sama juga dikatakan ketua lembaga keswadayaan masyarakat bahwa perencanaan sudah cukup efektif dan berjalan dengan lancar (Malik, Wawancara, 16 Februari 2014). Selaku Fasilitator Sosial mengatakan bahwa perencanaan yang dilakukan masih belum sempurna atau tidak begitu sesuai dengan harapan kami (Ani, Wawancara, 12 Februari 2014).

2. Strategi pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan adalah tahap pelaksanaan seluruh rencana yang telah disepakati dalam pertemuan Musyawarah Antar Desa/Kelurahan (sosialisasi), penetapan usulan, serta rapat-rapat persiapan pelaksanaan.

Pelaksanaan sejauh ini kurang efektif karena terkadang yang kami rencanakan di awal terhambat karena faktor-faktor tertentu misalnya dana/anggaran yang kurang memadai (Hariadi, Wawancara, 07 Februari 2014).

Pelaksanaan Program yang dilakukan baik dari masyarakat maupun dari tim fasilitator bisa dikatakan sudah cukup baik dan efektif karena mereka sudah mau menjalankan program yang sudah direncanakan

walaupun terkadang ada faktor penghambat (Malik, Wawancara, 16 Februari 2014).

Kemudian selaku Fasilitator Sosial mengatakan bahwa pelaksanaan yang dilakukan masih belum sempurna atau tidak begitu sesuai dengan harapan kami (Ani, Wawancara, 12 Februari 2014).

3. Strategi pelestarian

Strategi pemeliharaan/pelestarian PNPM Mandiri diarahkan kepada adanya perawatan dan pengembangan berbagai sarana dan prasarana yang ada, sehingga dapat secara terus-menerus dimanfaatkan oleh masyarakat secara efektif dan efisien.

Untuk menjamin terjadinya pemeliharaan, kegiatan yang harus dilakukan adalah:

- a. Rencana pemeliharaan sudah dimasukkan dalam usulan kegiatan. Tim pemeliharaan segera dibentuk dan dilatih paling lambat setelah penetapan usulan.
- b. Untuk setiap jenis prasarana tertentu, telah dibuat daftar penanggung jawab dan penetapan iuran.
- c. Untuk jenis kegiatan lain, ditetapkan kelompok pengelola dan pemeliharaan (Dokumentasi, 2008: 39).

Pelestarian sejauh ini dilakukan PNPM Mandiri kurang efektif dan tidak berjalan dengan baik (Hariadi, Wawancara, 07 Februari 2014).

Begitu juga dikatakan ketua Lembaga Keswadayaan Masyarakat bahwa pelestarian masih kurang efektif dan tidak berjalan dengan baik (Malik, Wawancara, 16 Februari 2014).

Fasilitator Sosial mengatakan bahwa pelestarian yang dilakukan masih belum sempurna atau tidak begitu sesuai dengan harapan kami (Ani, Wawancara, 12 Februari 2014).

4. Strategi pengawasan

PNPM Mandiri melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan program kerja harus mengetahui gerak-gerik yang akan dilakukan oleh masyarakat itu dalam menjalankan program kegiatan sehingga tidak ada simpang siur yang melanggar dari aturan yang sudah ada. Pengawasan yang dimaksud seperti melaporkan tentang kegiatan-kegiatan yang berkembang dalam masyarakat tentang masalah atau kendala-kendala yang mereka hadapi. Adapun pengawasan yang dilakukan selama ini tidak berjalan sebagaimana mestinya seperti berikut ini:

Untuk pengawasan bisa dikatakan kurang efektif karena sejauh ini masyarakat yang melaksanakan program mereka mengawasi diri mereka sendiri dengan tidak melakukan kecurangan misalnya terlambat dalam pembayaran hasil pinjaman yang melebihi tanggal/waktu yang telah ditetapkan setiap bulannya (Hariadi, Wawancara, 07 Februari 2014).

Hal yang sama juga dikatakan ketua lembaga keswadayaan masyarakat (LKM) bahwa Pengawasan dalam hal ini biasanya masyarakat hanya mengawasi diri mereka sendiri namun mereka selalu memberikan laporan dari hasil program yang mereka jalankan (Malik, Wawancara, 16 Februari 2014). Kemudian Fasilitator Sosial mengatakan bahwa pengawasan yang dilakukan masih belum sempurna atau tidak

begitu sesuai dengan yang diharapkan (Ani, Wawancara, 12 Februari 2014).

5. Strategi evaluasi

Dalam mengembangkan langkah-langkah strategi PNPM Mandiri yaitu mengevaluasi atas hal-hal yang telah dicapai dalam setiap periode jangka pendek sebagai suatu proses untuk melakukan kontrol dan sebagai input untuk pengambilan keputusan dimasa depan.

Pada tahap evaluasi juga masih kurang efektif dan tidak berjalan dengan baik dan lancar (Hariadi, Wawancara, 07 Februari 2014). Begitu juga dikatakan ketua Lembaga Keswadayaan Masyarakat bahwa untuk tahap evaluasi masih kurang efektif (Malik, Wawancara, 16 Februari 2014).

Hal yang sama juga dikatakan Tim Fasilitator Sosial bahwa evaluasi yang dilakukan masih belum sempurna atau tidak begitu sesuai dengan yang diharapkan (Ani, Wawancara, 12 Februari 2014).